

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badrun, B., Zulharnah, H. R., Sukri, A. S., Rustan, F. R., Sari, D. P., & Bungin, E. R. (2023). *Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air*. TOHAR MEDIA.
- Busroh, A, D, dkk., (2022), *ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA*, Ghalia Indonesia.
- ....., (2020), *Ilmu Negara*, Bumi Aksara.
- Busya Azheri, (2011), *Corporate Social Responsibility* dari *Voluntary* menjadi *Mandatori*, Raja Grafindo Pers.
- Djamali. A. R. (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers.
- Gede Aditya Pratama, (2023), *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV Mega Press Nusantara.
- Hadjon, M, P. (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press
- Hariyadi, P, (2022), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika Offset.
- Hamidi, J. dkk, (2012), *Teori Hukum Tata Negara*, Salemba Humanika.
- Hasyimzoem. Y, dkk., (2019), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (2007), “*General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, BEE Media Indonesia.
- Kurnianingrum, T, P, dkk., (2019), *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Marling, A, (2015), *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media.
- Marzuki, P, M, (2009), *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Messakh, J. J, (2017). *Pengelolaan Sumber Daya Air*. PMIPA PRESS.
- Mohtar, M. (2016), *Perbandingan Sistem Politik, Cetakan ke-16*, Universitas Gajah Mada Press.

Najih, M, dkk. (2020), *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, edisi revisi, Setara Press.

Ridwan, HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, S., (2010), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudrajat, T, (2020), *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika.

Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Alfabeta.

### **Jurnal**

Aridhayandi, M. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2934-2944.

Astriani, N. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1)

....., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. *Arena Hukum*, 13(2)

Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara

Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2)

Haq, R. Z. (2020). *Pertanggungjawaban Perusahaan Peternak Ayam "X" Akibat Kegiatan Pembakaran Batu Baru Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Fakultas hukum Universitas Pasundan).

Kirana, K. C. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11)

Khairi, M. (2017). Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 3(1)

- Limuris, F. C. (2021). Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Jurnal Jentera Volume 4*
- Marsono, M., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2)
- Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum: studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(01)
- Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01)
- Putri, A. B., Cherieshta, J., & Rasji, R. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8)
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3)
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ham*, 12(1)
- Susanti, L. (2018). Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2)
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1)
- Tauhid, R. (2020). Dasar-Dasar Teori Pembelajaran. *JURNAL PENDAS (Pendidikan Sekolah Dasar)*, 2(2)
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2)
- Wahyuni, R. (2024). Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(4)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan

## **Internet**

<https://fia.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/AgusSuryono-MakalahSeminar-STIAMI-JAKARTA.docx>, diakses pada tanggal 13 November 2024

[https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta\\_timur-Badan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Konsumen%20\(BPSK\)-NW91RrcBm88g.pdf](https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta_timur-Badan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Konsumen%20(BPSK)-NW91RrcBm88g.pdf), diakses pada tanggal 13 Februari 2025

<https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/#:~:text=Konsep%20negara%20kesejahteraan%20sendiri%20>

[20dinamakan,kesejahteraan%20bagi%20setiap%20warga%20negaranya](#), diakses pada tanggal 12 November 2024

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/14732/Aset-Sumber-Daya-Air.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-lt59b0ad66be83a/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat-lt5f93bb06c2af9/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025

